

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 mempunyai 9 sektor basis, di antaranya yaitu sektor konstruksi, sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan, dan lain-lainnya.
2. Berdasarkan hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), menunjukkan dari ke-17 sektor yang ada hanya 3 sektor yang akan menjadi basis pada masa yang akan datang yaitu pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi.
3. Hasil analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 ada 12 sektor ekonomi yang mempunyai kriteria bernilai positif, di antaranya yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor *real estate*, dan juga sektor lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa ke-12 sektor tersebut adalah sektor maju atau dalam kurun waktu kedepan perkembangannya masih lebih baik dibandingkan dengan perkembangan di Provinsi Banten.
4. Berdasarkan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) menunjukkan sektor yang mempunyai rasio laju pertumbuhan potensial sebanyak 7 sektor, di antaranya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, dan sektor lainnya. Hal ini berarti ke-7 sektor tersebut memiliki kegiatan ekonomi di sektor

tertentu, baik ditingkat wilayah studi maupun ditingkat wilayah referensi yang pertumbuhannya lebih menonjol.

5. Berdasarkan analisis *Overlay*, dapat diketahui terdapat 5 sektor basis di Kota Tangerang Selatan di antaranya yaitu sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan, dan juga sektor lainnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa ke-5 sektor ini maju dengan pertumbuhan yang dominan dan juga sangat baik untuk dikembangkan di masa depan.
6. Strategi pengembangan ekonomi daerah sangat dibutuhkan dan dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang terkait. Maka peran pemerintah amat penting dalam upaya mendukung serta meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

4.2 Saran

1. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab serta wewenang untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam hal ini Pemerintah daerah yaitu pemerintah Provinsi Banten penting untuk membuat suatu kebijakan pembangunan dengan memprioritaskan dikembangkannya sektor unggulan atau basis di setiap kabupaten/kota, di mana sektor non basis harus tetap diperhatikan secara proporsional.
2. Pemerintah perlu memahami daerah dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah sehingga mereka dapat mengukur prioritas pembangunan dengan bijak.

3. Dalam hal agar kebijakan berjalan dengan baik, maka perlu dukungan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu ikut mendukung program pemerintah dalam pengembangan sektor unggulan/basis.